

■ Raperda Pertanggungjawaban APBD 2013 Ditetapkan

Piutang Capai Rp 32,463 Miliar

DEMAK - Setelah mendapatkan hasil evaluasi dari Gubernur Jateng, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2013 yang telah disempurnakan ditetapkan DPRD Demak, Jumat (20/6).

Kesepakatan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pun tercapai dengan sejumlah ketentuan, antara lain lebih cermat dalam merancang target pendapatan dengan memperhatikan potensi yang ada. Di samping juga melakukan upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.

Sebagaimana disampaikan Wakil ketua Badan Anggaran DPRD Demak Mugiyono SSoS SH MH, pencapaian kinerja kegiatan SKPD jika dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih banyak yang jauh dari nominal anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Seperti di Dinas Dikpora dan Dishubkominfo yang beberapa kegiatannya tidak terealisasi atau ekuivalen 0 persen (0%), yakni pembangunan gedung kantor yang dialokasikan pada APBD perubahan senilai Rp 300 juta, sosialisasi kantin kejujuran dari Bangub senilai Rp 10 juta, serta pembangunan gedung terminal senilai Rp 400 juta.

"Ini menandakan kekurangcermatan SKPD sebagai pengguna

anggaran dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam percepatan penyerapan anggaran," ujarnya.

■ Piutang Rp 32,463 Miliar

Selain itu, lanjut Mugiyono, ada pula sejumlah piutang hingga total sejumlah Rp 32,463 miliar. Meliputi piutang pajak daerah sebesar Rp 23,250 miliar, piutang retribusi Rp 331,464 juta, piutang lain-lain Rp 8.880 miliar dan penyisihan piutang tak tertagih Rp 30,279 juta.

Menurut politisi PDIP tersebut, kondisi demikian mengindikasikan lemahnya upaya pengendalian dan penagihan piutang. Sehingga pada akhirnya berimbas pada banyaknya kegiatan yang tak tere-

alisasi karena ketiadaan anggaran.

Sehubungan itu Badan Anggaran DPRD dan TAPD pun sepakat meningkatkan kualitas perencanaan pendapatan dan pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Sehingga pada masa mendatang Pemkab Demak dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada hasil audit BPK RI terhadap realisasi APBD tahun-tahun berikutnya.

Pada saat yang sama Badan Anggaran DPRD Demak juga menyarankan kepada seluruh SKPD agar meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, sehingga penyerapannya dapat berjalan optimal sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. ■ ssi/SR



TETAPKAN RAPERDA: Bupati H Moh Dachirin Said disaksikan para pimpinan DPRD Demak dan Wabup Harwanto menandatangani Raperda Penyempurnaan Pertanggungjawaban APBD 2013. ■ Foto: sari jati/SR